

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan saraf pusat perekonomian dalam suatu negara dengan tujuan mengetahui munculnya suatu penurunan ataupun peningkatan suatu kegiatan ekonomi di suatu negara pada jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya penurunan ataupun peningkatan suatu pencapaian kinerja ekonomi yang dapat dibandingkan dari periode satu ke periode lainnya.

Krisis merupakan suatu perubahan negatif dalam urusan sosial, keamanan atau lingkungan. Krisis pada dasarnya merupakan sebuah situasi yang tidak terduga, artinya organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaannya. Pengertian tentang krisis dikemukakan oleh Robert P. Powell dalam bukunya "*Crisis A Leadership Opportunity*" menyatakan bahwa krisis adalah peristiwa yang tidak diharapkan dan diinginkan, yang akan berdampak signifikan, kadang juga sebelumnya belum pernah terjadi sehingga menyebabkan kekacauan pada suatu organisasi atau negara dan dapat menghancurkan organisasi tersebut jika tidak ada tindakan nyata (Victor Braden, 2005).

Sementara krisis ekonomi merupakan kemerosotan aktivitas ekonomi sehingga menurunkan pendapatan negara dan menurunkan daya beli masyarakat. Krisis ekonomi pernah terjadi pada tahun 2008-2009 yang merupakan krisis terburuk dalam 80 tahun terakhir. Krisis ini diawali dengan terjadinya kredit yang dikucurkan oleh perbankan Amerika terhadap sektor perumahan atau yang dikenal dengan *subprime mortgage*. Hal tersebut ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam di Amerika Serikat. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika Serikat, tetapi juga dirasakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi tersebut tidak hanya menghancurkan sendi-sendi sektor keuangan tetapi juga berdampak pada sektor riil domestik Indonesia (Sugema, 2012).

Di tahun 2019, krisis ekonomi kembali terjadi dan menyebabkan perlambatan ekonomi dunia masih terjadi, dan tumbuh sebesar 2,9% atau mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 3,9% pada tahun 2017 dan 3,6% pada tahun 2018. Nilai pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 ini juga dibawah

prediksi IMF pada April 2019 yang menyatakan bahwa ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,3%.

Sementara itu, perekonomian Indonesia mengalami penurunan di tahun 2019-2021. Munculnya pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia juga sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan negatif. Pada tahun 2019, sebelum adanya pandemi kondisi perekonomian Indonesia tumbuh hingga 5,02 persen. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan hingga -2,07 persen yang disebabkan oleh kondisi krisis kesehatan dunia akibat pandemic Covid-19. Setelah berjalannya “*new normal*” dan pemerataan vaksin oleh seluruh masyarakat Indonesia membuat adanya sedikit peningkatan sebesar 3,69 persen yang terjadi di tahun 2021.



Gambar 1. Target dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2022
(Sumber : BPS 2017-2022)

Berdasarkan PDB atas harga dasar di tahun 2017, perekonomian Indonesia mencapai RP. 13.588,8 T yang tumbuh sebesar 5,07 persen lebih besar daripada tahun 2016 yaitu 5,03 persen. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) capaian itu lebih rendah dari target yang telah dipatok dalam APBNP tahun 2017 sebesar 5,2% capaian itu menjadi yang tertinggi sejak 2014 (Suhariyanto, 2018). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor

Barang dan Jasa sebesar 9,09%. Hal ini disebabkan dari kondisi global yang lebih kondusif serta stabilitas makroekonomi yang terjaga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 (Chandra Glan Asmara, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% (Statistik B. P., 2019) berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40% (Indonesia D. P., 2019). Walaupun tidak memenuhi target, pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tumbuh 5,07%. Kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan adanya kondisi ekonomi makro yang stabil seperti terkendalinya pergerakan harga. Di tahun 2018 terdapat lima lembaga peringkat dunia yang menilai dan menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam posisi rating *investment grade*. Indonesia juga naik dua peringkat dari 47 di tahun 2017 dan posisi 45 dari 140 negara oleh Global Competitiveness Index. Sementara itu, adanya *event* besar seperti Asian Games dan Annual Meeting IMF-World yang terjadi di tahun 2018 juga membuat Indonesia dilirik dan dapat meningkatkan kepercayaan dunia Internasional terhadap perkembangan perekonomian Indonesia (KOMINFO, 2019).

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau tumbuh sebesar 5,02% (Statistik B. P., 2020). Realisasi ini di bawah target yang tertuang dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan berdampak pada turunnya kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2019 (Keuangan K. , 2019).

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07% ((BPS), 2021) yang sebelumnya dalam APBN tahun anggaran 2020diperkirakan mencapai sekitar 5,3%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi karena perkembangan ekonomi di Indonesiamempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Konsumsi di Indonesia tidak terkendali karena situasi yangterjadi dan menyebabkan perekonomian menurun. Konsumsi pemerintah mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen. Hal ini karena pemerintah mengurangi alokasi di bidang infrastruktur pada tahun 2020 sedangkan anggaran untuk kesehatan

lebih ditingkatkan sesuai dengan fokus pemerintah untuk penanggulangan pandemi di Indonesia (Keuangan K. , 2019).

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 sebesar 3,69 % secara kumulatif yang artinya dibawah target APBN 2021 yaitu 5,0% (Keuangan K. , 2020). Akan tetapi, pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi perekonomian Indonesia yang mulai tumbuh dengan stabil daripada tahun sebelumnya dengan PDB sebesar 11.118.868.500 Miliar rupiah. Kondisi ini tidak terlepas akibat adanya “*new normal*” mengizinkan kegiatan perekonomian mulai terkendali meskipun kondisi tersebut tetap dibawah peraturan protokol. Di sepanjang tahun 2021 hampir semua sektor perekonomian di Indonesia mengalami kondisi yang stabil. Sektor kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor yang paling mengalami pertumbuhan yang paling signifikan yang tumbuh sekitar 10,46 persen yang setelahnya yaitu sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 6,81 persen (Statistik B. P., 2022).

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang ditopang oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,40% menurut BPS dengan target 5,0%-5,5% sesuai dengan yang tertuang dalam RUU APBN. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal antara lain, pemulihan konsumsi domestik, pemulihan ekonomi global dan juga, peningkatan permintaan ekspor (Keuangan B. K., 2022). Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Pada masa pandemi terhitung dari 2019 – 2021 pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjang oleh faktor eksternal. Salah satunya yakni keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional G20 yang menunjang pemulihan ekonomi dari berbagai sektor. Forum G20 merupakan sebuah forum informal terbatas yang terdiri dari negara-negara industri, negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah menuju menengah serta Uni Eropa. Forum ini memiliki posisi strategis secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global dan 85% perekonomian dunia. Oleh karena itu, keberhasilan negara-negara G20 tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi krisis yang dialami Indonesia akibat pandemi yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi?”

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Konsep Diplomasi Ekonomi

Salah satu bentuk suatu diplomasi yang menggunakan “alat” ekonomi demi tercapainya suatu tujuan serta kepentingan suatu negara atau organisasi. Konsep diplomasi ekonomi secara universal diartikan sebagai keputusan serta pengajuan kebijakan berbagai diskusi mengenai kemudahan dari tujuan ekonomi tersebut guna tercapainya suatu kepentingan nasional itu sendiri dan digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi atau bernegosiasi agar terciptanya kesepakatan antar negara atau lebih. Konsep ini juga merujuk pada kepentingan suatu masalah investasi, pelaksanaan proyek pembangunan, perdagangan (ekspor/impor), dan kegiatan ekonomi lainnya. Diplomasi ekonomi telah menghiiasi semakin pentingnya ekonomi politik internasional dan hubungan antar negara, yang telah meningkatkan sifat multi-pemangku kepentingan dari keterlibatan diplomasi ekonomi, dan membawa serta pergeseran prioritas dan persepsi manajer publik terhadap diplomasi kontemporer.

Rana dalam *Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries* mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai suatu proses, melalui proses dimana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, guna memaksimalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Menurut Rana, terdapat beberapa hal penting yang membuat berhasilnya suatu diplomasi ekonomi tersebut yaitu, hubungan luar negeri yang tidak hanya melibatkan kementerian luar negeri serta yang bersangkutan akan tetapi juga mengikutsertakan dari semua bidang bisnis dari negara yang bersangkutan, sistem tata kelola oleh badan pengaturan ekonomi kementerian luar negeri harus selaras dan terintegrasi, serta membuat kerangka peraturan dagang yang diresmikan oleh pemerintah yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama dengan pelaku bisnis.

Elemen penting dalam suatu negara yaitu diplomasi ekonomi demi menjalankan hubungan ekonominya antar suatu negara lain sebab suatu hubungan ekonomi internasional tidak akan terwujudkan jika hanya mengandalkan pasar internasional.

Berdiplomasi ekonomi dalam pemahaman ini merupakan suatu senjata penting bagi negara demi terjalinnya kerjasama dan kepentingan nasionalnya (Rana).

Pavol Baranay yang merupakan seorang diplomat ekonomi dan komersial Slovakia mendefinisikan diplomasi ekonomi merupakan suatu kegiatan resmi diplomat yang memiliki tujuan kepentingan ekonomi level internasional pada suatu negara. Menarik investasi asing, meningkatkan ekspor impor, serta kerja sama dalam organisasi internasional dunia, yang merupakan aktivitas dari diplomasi ekonomi itu sendiri. (Baranay, 2009). Dalam mengelola relasi ekonominya, diplomasi ekonomi merupakan elemen penting bagi suatu negara dengan dunia luar. Di pemahaman ini, diplomasi ekonomi menjadi alat penting bagi negara untuk menjalin kesepakatan kerja sama ataupun konflik dalam sistem internasionalnya.

Hal ini sejalan dengan Woolclok yang melihat diplomasi ekonomi sebagai rangkaian dua aktivitas besar yakni proses pengambilan keputusan (*decision making*) dan proses negosiasi (*negotiation*) dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup (Woolclok, 2012). Diplomasi ekonomi yang menitikberatkan dalam aktor diplomasi dan aktivitas, institusi, hubungan dimana dengan tujuan mengelola dan menciptakan ketergantungan ekonomi (B, 2010).

Diplomasi ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mencapai keamanan ekonomi dalam sistem internasional yang anarkis. Melalui konsep diplomasi ekonomi, hal ini menuntut negara-negara untuk memahami bentuk interaksi ekonomi internasional berdasarkan kepentingan ekonomi. Konsep ini akan berpengaruh pada rekomendasi model diplomasi, negosiasi negara dalam melakukan interaksi di tingkat internasional. Konsep ini memberikan tata kelola hubungan eksternal, pola perdagangan, investasi, manajemen kebijakan, dan fokus keterlibatan aktor lain dalam diplomasi ekonomi (Fathun, 2020).

Dengan demikian, Indonesia mengusung tiga sektor prioritas demi mencapai target sesuai dengan tema G20 2022 yakni penguatan arsitektur kesehatan global untuk pemulihan pasca pandemi, transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Ketiga sektor tersebut diharapkan memberi dampak langsung maupun tidak langsung ke berbagai sektor yang menjadi komitmen pemerintah serta memberi *multiplier effect* pada sektor lainnya.

Selain itu, forum G20 dinilai berhasil menarik investasi dan bantuan untuk berbagai program pemerintah, misalnya pada isu kesehatan seperti pembentukan dana

pandemi dan juga isu transisi energi yaitu penyiapan platform bagi negara-negara transisi energi. Presidensi G20 juga mampu menarik investasi UMKM dalam negeri karena saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20 dan diikuti dengan adanya pertemuan kalangan bisnis serta para pemimpin dunia usaha yang semakin memperkuat peran Indonesia dalam memberikan arahan dan dukungan bagi perkembangan dunia usaha global. Kerja sama yang baik antara sektor publik atau pemerintah dengan sektor swasta atau dunia usaha akan menjadi kunci kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, Indonesia memulihkan krisis ekonomi akibat pandemi dengan menjadikan forum G20 sebagai sarana kerja sama dan menarik investasi serta bantuan luar negeri demimemulihkan krisis ekonomi akibat pandemi.

1.5 Metodologi

Untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan penelusuran pustaka atau literatur terkait topik maupun data dari penelitian serupa sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa data-data dari media seperti situs internet, koran elektrik, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi sebagai upaya pemulihan krisis ekonomi pasca pandemi melalui presidensi G20 di Indonesia tahun 2021-2022. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

1.6 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana upaya Indonesia melakukan diplomasi ekonomi melalui presidensi G20 pada tahun 2021-2022 dalam memulihkan krisis ekonomi pasca pandemi.

1.7 Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar dari tema yang diinginkan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian dimulai dari masa presidensi Indonesia dalam forum G20 yaitu pada tahun 2021-2022.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang ulasan pemahaman yang akan menerangkan berbagai penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian, yang akan dibagi dalam sub mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kondisi Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi

Bab ini berisikan pembahasan mengenai perekonomian yang terjadi di Indonesia semasa pandemi di berbagai sektor ekonomi.

Bab III: Presidensi G20 Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia

Bab ini berisi membahas latar belakang terbentuknya forum G20 dan upaya Indonesia dalam memulihkan krisis ekonominya melalui Presidensi G20 di tahun 2021-2022.

Bab IV: Kesimpulan

Bab ini berisikan penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian.